



Implementation of Policy “Praktisi Mengajar” in Higher Education

Mufarrihul Hazin¹, Nur Wedia Devi Rahmawati²

¹ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

² UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Corresponding Author : ✉ mufarrihulhazin@unesa.ac.id

ABSTRACT

The main component in education is the development of the quality of educational processes and outcomes. The Teaching Practitioner Policy is the government's effort to improve the quality of education, so that there is a link and match between education and employment. The purpose of this research is to analyze how the policy implementation of teaching practitioners in tertiary institutions is implemented. The method used is qualitative with the type of field research (field research). Collecting data using interviews, observation and documentation. The results of the study show that there are 4 main factors that influence the implementation of teaching practitioners' policies. (1) continuous communication and outreach through offline media, online media, and social media; (2) there are sufficient resources, from human resources (regulators, lecturers and practitioners), financial resources, and adequate facilities; (3) the disposition of policy implementers who have an attitude of commitment, mutual collaboration, and positive behavior. (4) a clear bureaucratic structure in terms of the flow of implementation and division of tasks for policy implementers, from ministries, universities, to practitioners. Thus, the authors recommend that all matters that influence the successful implementation of this teaching practitioner policy to always be improved and made continuous improvements.

Policy Implementation, Teaching Practitioners, Universities

ARTICLE INFO

Article history:

Received

05 January 2023

Revised

18 January 2023

Accepted

21 January 2023

Key Word

How to cite

Doi

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jetl>

[10.51178/jetl.v5i1.1001](https://doi.org/10.51178/jetl.v5i1.1001)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan indikator utama penentu kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah mereka yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia ini dilahirkan dan dikembangkan melalui lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk mewujudkan itu, maka perlu adanya terobosan yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Apalagi, saat ini kita sudah memasuki abad 21, era dimana perubahan begitu cepat (Santika, 2021).

Pendidikan Abad 21 adalah pendidikan yang mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap dan teknologi informasi (Mardhiyah et al., 2021). Dalam pembelajaran abad 21, ada 3 skills utama yang dibutuhkan yaitu; (1) *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis & pemecahan masalah), (2) *creativity and innovation* (daya cipta dan inovasi), (3) *communication and collaboration* (komunikasi dan kerjasama). Kolaborasi dalam dunia Pendidikan bisa dimulai dari dalam kelas. Saat guru atau dosen memberikan pengetahuan akan pentingnya kolaborasi dan memberikan tugas kelompok (Widayanti et al., 2022). Selain itu, kolaborasi juga harus dilakukan dengan kebijakan yang diatur oleh level kementerian agar kolaborasi yang dilakukan bisa secara menyeluruh dan lintas sektor. Khususnya pada perguruan tinggi, maka kolaborasi menjadi kunci penting dalam melakukan perkuliahan.

Perkuliahan pada institusi pendidikan tinggi memerlukan partisipasi praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana best practice yang dilakukan. Berbeda dengan perkuliahan pada umumnya di perguruan tinggi, Program menyediakan ruang kolaborasi antara dosen dan praktisi yang memiliki pengalaman industri dengan dosen yang dilaksanakan selama satu semester. Program dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan dan berguna untuk mengisi kesenjangan antara keterampilan dan pengalaman praktisi industri yang diberikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja.

Praktisi Mengajar adalah Program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022). Program ini mendorong kolaborasi aktif praktisi ahli dengan dosen juara agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja. Kolaborasi ini dilakukan dalam mata kuliah yang disampaikan di ruang kelas baik secara luring maupun daring.

Tujuan dari Program Praktisi Mengajar ini adalah: (1) Menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif, yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja. (2) Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif. (3) Menjadi sarana yang mampu menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia kerja.

Kebijakan Program praktisi mengajar merupakan kebijakan yang bagus, namun kebijakan yang baik saja tidak cukup, harus ada implementasi yang baik pula. Dalam teori kebijakan terdapat 5 elemen, sebagaimana pernyataan Dye (Dunn, 2000) yaitu; identifikasi masalah (agenda setting), perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Gambar 1.
Proses Kebijakan Publik



Ketika kebijakan telah dibuat, maka hal terpenting adalah implementasinya. Sebagaimana pernyataan Nugroho, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Kehik et al., 2016). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Dengan demikian, Penelitian ini menjadi sangat penting, karena akan membahas dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program praktisi mengajar pada perguruan tinggi yang merupakan bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian dilakukan di Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses: kondensasi data (penggabungan dan penguatan data), penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Nendissa et al., 2021). Uji kesahihan data yang digunakan meliputi: uji *kredibility* (melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data), uji *transferability* (melalui penyusunan hasil penelitian dengan rinci, jelas, dan sistematis), uji *dependability*

(melalui audit keseluruhan proses penelitian), serta uji *confirmability* (melalui publikasi hasil penelitian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan praktisi mengajar pada perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: komponen komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar

Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar. Hal ini dilakukan secara komprehensif mulai dari sosialisasi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada para perguruan tinggi dan berbagai lembaga/perusahaan. Kebijakan ini kemudian oleh perguruan tinggi disosialisasikan kepada para dosen, begitu juga dengan lembaga/perusahaan disosialisasikan kepada para praktisi yang terdapat dalam lembaga tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam melakukan komunikasi terhadap program praktisi mengajar tidak hanya dilakukan melalui forum-forum resmi, namun juga dengan berbagai media, mulai website resmi dikti, maupaun media sosial. Selain itu, untuk mendapat kejelasan terkait bagaimana program praktisi mengajar ini, maka ada website resmi yang menjelaskan berbagai informasi terkait kebijakan dan program ini melalui <https://praktisimengajar.id/>.

Gambar 2.
Website Resmi Program Praktisi Mengajar



Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran implementasi suatu kebijakan praktisi

mengajar. Suatu kebijakan akan berjalan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Selain itu, para pembuat keputusan dan pelaksana di lapangan sudah mengetahui sekaligus memahami apa yang mereka kerjakan secara jelas dan mengetahui mengapa kebijakan itu dibuat (Syani et al., 2018).

Sedangkan implementasi praktisi mengajar di Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh ketua jurusan dengan mengumpulkan seluruh para dosen, kemudian diberikan pengarahan sekaligus simulasi untuk pembuatan pengajaran praktisi mengajar. Setelah itu, dibuat pengawalan dengan groups khusus untuk pelaksanaan praktisi mengajar.

Hasil penelitian inilah yang menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam upaya mengimplementasi kebijakan praktisi mengajar pada perguruan tinggi, memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: 1) adanya sosialisasi penyampaian kebijakan; 2) kejelasan dalam komunikasi kebijakan; dan 3) konsistensi dalam sosialisasi kebijakan praktisi mengajar.

Menurut pandang Edwards informasi kebijakan pendidikan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara jelas dan konsisten (Baidowi, 2020). Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran (Yoshua Pangalila. Johanis Kaawoan. Neni Kumayas, 2019).

Dengan demikian, implementasi praktisi mengajar dapat dilaksanakan dengan dimulai adanya komunikasi yang baik dan jelas, dan dilakukan secara konsisten. Komunikasi yang dilakukan secara terus menerus baik secara langsung maupun melalui media, akan sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan (Hazin, 2017).

Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar, sumber daya yang digunakan secara keseluruhan cukup memadai. Sumber daya yang mendukung implementasi praktisi mengajar di perguruan tinggi yang terbesar adalah adanya sumber daya manusia yang cukup. Hal ini dapat terlihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
SDM Praktisi Mengajar Secara Nasional

No	Angkatan	Jumlah Kolaborasi Intensif		Jumlah kolaborasi pendek	
		Pro-Bono	Didanai	Pro-bono	Didanai
1	Angkatan 1	1	191	58	725
2	Angkatan 2	12	428	57	1113
3	Angkatan 3	11	360	161	1559
4	Angkatan 4	0	17	20	223
Sub-Total		24	996	296	3620
Jumlah Total			4936		

Data diatas diperoleh dari hasil pengumuman yang tertera dalam website resmi praktisi mengajar. Oleh karenanya, dilihat data tersebut sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program ini sangat memadahi. Keberadaan faktor sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan pendidikan karakter pada perguruan tinggi memegang peranan sangat peting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

Sedangkan Sumber daya manusia 2 yang terlibat pada Jurusan Manajemen Pendidikan terdiri dari 13 praktisi dengan 8 mata kuliah dan 9 dosen pengampu. Hal ini sebagaimana yang tersajikan pada tabel. 2

Tabel 2.
SDM Praktisi Mengajar di Manajemen Pendidikan

No	Mata Kuliah	Skema	Kelas	Praktisi
1	Manajemen Kurikulum	Intensif	2021 A-B	Aji Santoso
2	Manajemen Mutu Terpadu	Intensif	2021 A	Oni Zakiyah
3	Manajemen Mutu Terpadu	Intensif	2021 B	Muhammad Ardy Rizki A
4	Perencanaan Pendidikan	Intensif	2021 A	Ni Ketut Irma Parwati, M.Pd
5	Perencanaan Pendidikan	Intensif	2021 B	Mujiono, S.Pd., M.Pd.
6	Statistik	Intensif	2021 B	M. Iman Hidayat
7	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	Intensif	2022 B	Adhimas Wahyu Agung, M.EdSt
8	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	Intensif	2022 A	Cici Indriani Dalimunte
9	Kapita Seleкта	Intensif	2020 A	Drs. Sudarto, M.Si
10	Manajemen Strategi	Intensif	2021 A	Ahmad Faishol Amin

11	Manajemen Strategi	Intensif	2021 B	Mochammad Ferdion Firdaus
12	Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan	Intensif	2021 A	Vany Fitria
13	Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan	Intensif	2021 B	Ressa Uli Patrissia

Menurut Edward III sumber daya (*resources*) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan (Rodhiyah et al., 2018). Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumberdaya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan, termasuk sumberdaya manusia (Murtadlo & Hazin, 2018). Kesiapan sumberdaya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan (Umroh et al., 2018).

Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar bukan sekedar SDM, namun sumberdaya finansial. Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi telah menganggarkan untuk para praktisi yang bergabung dalam program praktisi mengajar. Standar honor praktisi dalam Program ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Besaran honor praktisi yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Besaran Honor Praktisi

No	KATEGORI	Nominal Honor (orang per jam)
1	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan dengan Eselon I	Rp. 1.400.000,-
2	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan dengan Eselon II	Rp. 1.000.000,-
3	Pejabat Eselon III/ yang disetarakan dengan Eselon III	Rp. 900.000,-

Sumberdaya lain yang digunakan dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar yaitu fasilitas. Sumberdaya ini merupakan sumberdaya pendukung terlaksananya program praktisi mengajar. Fasilitas yang dimaksud disini yaitu sistem teknologi informasi yang terintegrasi melalui website resmi praktisi mengajar. Perguruan tinggi dan dosen dapat mencari para praktisi melalui satu sistem dan melakukan interaksi. Selain itu, fasilitas disini juga meliputi media pembelajaran yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan ini, baik online, maupun offline.

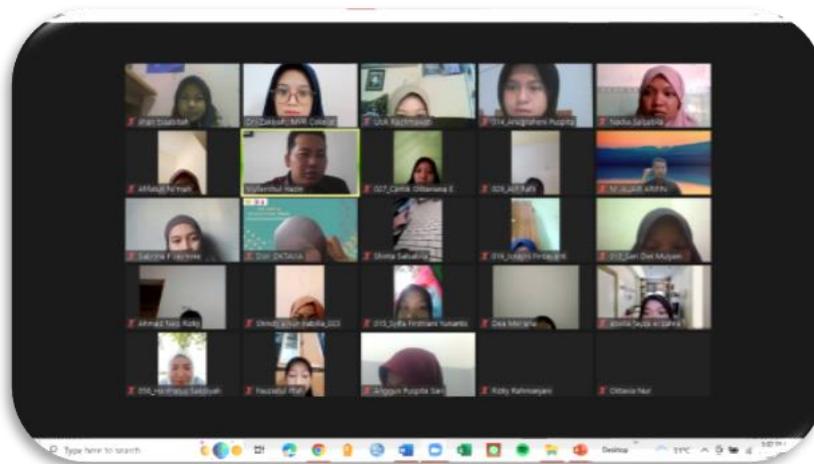
Hal ini sesuai dengan pernyataan Khaikleng, P, Wongwanich S., Sujiva, S. dukungan sumberdaya mempengaruhi terlaksananya sebuah kebijakan. Sumberdaya ini terdiri dari sumberdaya manusia, keuangan dan fasilitas. Kemudian diperkuat dengan pernyataan bahwa masalah implementasi kebijakan selama ini adalah terhambatnya sumberdaya yang mendukung (Geru, 2012).

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar

Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan praktisi pengajar, para implementator/pelaksana kebijakan memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan program ini. Hal ini ditunjukkan dari pengelola kebijakan yang telah ditunjuk kementerian melaksanakan secara baik, baik tim teknis maupun tim non teknis. Selain itu, terlihat juga dari antusiasme perguruan tinggi yang mengikuti dan para dosen yang mengawal dan bekerjasama hingga berakhirnya program ini. begitu juga, dengan para praktisi yang telah bergabung memiliki komitmen untuk mensukseskan dengan cara memberikan pengalamannya secara maksimal.

Hal ini, sesuaikan dengan ungkapan Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Utami, 2021). Jika implementasi suatu kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Gambar 3.
Komitmen Dan Kolaborasi Dalam Praktisi Mengajar



Hasil penelian juga menunjukkan bahwa para dosen yang ada di perguruan tinggi dan para praktisi memiliki 3 sikap dalam

mengimplementasikan kebijakan ini, yaitu: (1) komitmen yang tinggi, (2) kolaborasi yang saling membantu dan menguntungkan, (3) respon dan sikap yang positif. Hal ini juga ditunjukkan dari beberapa dosen dan praktisi yang melaksanakan program ini di Jurusan Manajemen Pendidikan Unesa.

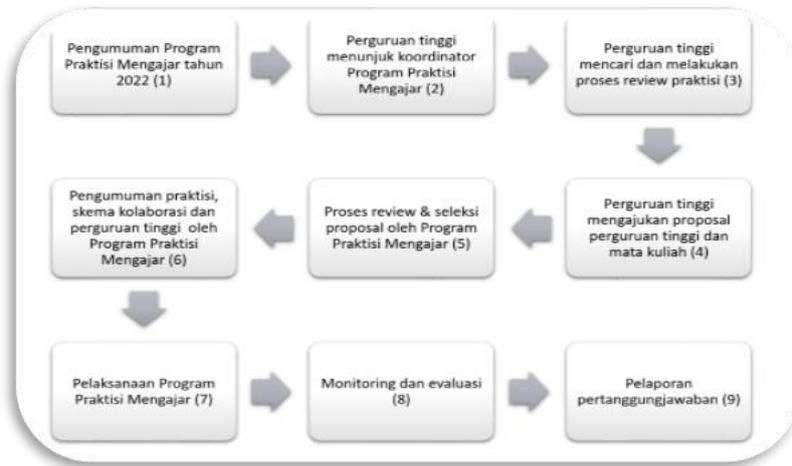
Hal ini diperkuat oleh DeGroff & Cargo dalam implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor dan pelaksana kebijakan, maka diperlukan sikap dan komitmen para pelaksana untuk melaksanakan hasil kebijakan yang telah dibuat (Akib, 2010). Selain itu, seseorang akan melaksanakan kegiatan ketika mereka memahami dan memiliki respon yang positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan program praktisi mengajar ini, kementerian pendidikan dan kebudayaan membuat tim pelaksana praktisi mengajar yang dinaungi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Struktur birokrasi adalah faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi praktisi mengajar. karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada (Degodona & Lubis, 2022). Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, alur proses (SOP), pembagian kerja, dan standar keberhasilan.

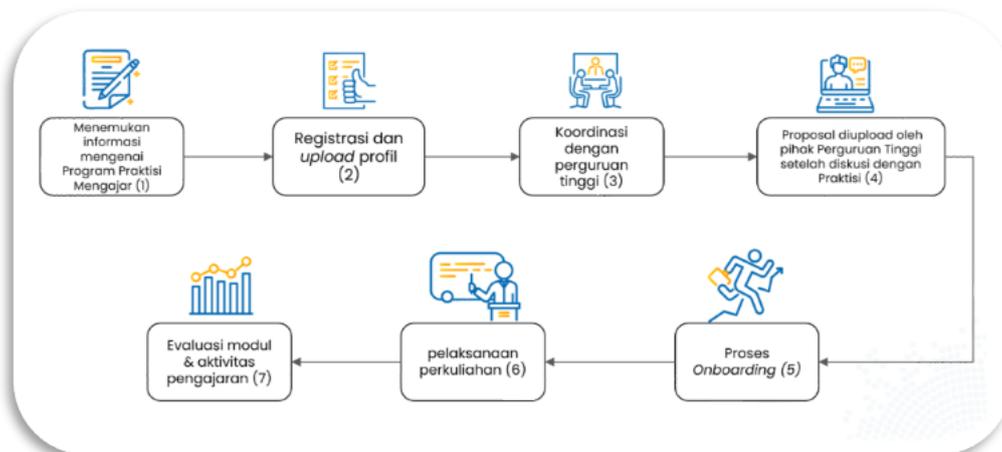
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar pada perguruan tinggi terdapat dua aspek utama, yaitu: (1) standart operational prosedur (SOP) yang jelas; (2) fragmentasi atau pembagian tugas kepada penanggungjawab unit masing-masing. Pelaksanaan Program mengikuti tahapan proses yang berlangsung selama 1 (satu) semester sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi. Alur proses Program untuk perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4.
Alur Proses Untuk Perguruan Tinggi



Sedangkan alur proses Program praktisi mengajar untuk para praktisi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.
Alur Proses Untuk Praktisi



Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan (Laponte et al., 2019).

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi (Nurlailah, 2021). Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau

kebijakan (Muhammad & Aziz, 2020). Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelaksana di tingkat kementerian, pelaksana tingkat perguruan tinggi (pengelola dan dosen), hingga para praktisi. Mereka semuanya saling berkoordinasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan praktisi mengajar dapat diwujudkan dengan empat faktor utama, yaitu (1) komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus melalui media luring, media online, dan media sosial; (2) adanya sumber daya yang mencukupi, dari sumber daya manusia (regulator, dosen dan praktisi), sumberdaya finansial, dan fasilitas yang memadai; (3) disposisi pelaksana kebijakan yang memiliki sikap komitmen, saling kolaborasi, hingga perilaku yang positif. (4) struktur birokrasi yang jelas secara alur pelaksanaan dan pembegaian tugas para pelaksana kebijakan, dari kementerian, perguruan tinggi, hingga para praktisi. Dengan demikian, maka penulis merekomendasikan agar seluruh hal yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan praktisi mengajar ini untuk selalu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

PENGAKUAN

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya ketua jurusan manajemen pendidikan, Bapak Syunu Trihantoto, M.Pd. Ucapan terimakasih juga kepada dosen praktisi mengajar program kemdikbud yang telah berpatrner dengan saya, dari PT Mayora; Ibu Oni Zakiyah, dari PT. PLN; Bapak Faishol Amin, dari PT. ASTRA; Bapak Muhammad Ardy Rizki Ananda, dan dari KemenkoPMK, Mochammad Ferdion Firdaus . Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana? *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal of Educational Management*, 1(September), 85-102. <https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.167>
- Degodona, L. P., & Lubis, N. Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan KTP-El Dimasa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Medan Timur.

- Jurnal Stindo Profesional*, VIII(September), 27–44.
- Geru, H. A. (2012). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Wanita. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 1, 19–28. <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v12i1.900>
- Kehik, B. S., Kolne, S. V., & Atanus, F. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri Cinta Petani di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Agrimor*, 1(04), 75–77. <https://doi.org/10.32938/ag.v1i04.110>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (2022). *PRAKTISI MENGAJAR Tahun 2022*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Laponte, Y., Samudin, M. T., & Fery, F. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.675>
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 187–193. <https://doi.org/10.31849/lectura.v12i1.5813>
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Murtadlo, M., & Hazin, M. (2018). *Model of Human Resource Management in Inclusive Education in East Java*. 212, 541–544. <https://doi.org/10.2991/icei-18.2018.117>
- Nendissa, S. J., Tyaningsih, R. yulis, Hazin, M., Lestari, N. D., Syahfitri, D., Ferdiansyah, D. sani, Jalal, N. M., Soulisa, I., Naibaho, L., Cahyono, B. D., Fuadi, A., Asriandi, Zatira, D., & Kusumaningsih, A. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1135>
- Rodhiyah, C. Q., Ali, A. R., & Hazin, M. (2018). Implementasi Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa Dalam Membentuk Perilaku Siswa Yang Berkarakter di SMA Negeri 7 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 10–16.
- Santika, I. G. N. (2021). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500>
- Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2018). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *KHAZANAH PENDIDIKAN*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Umroh, A., Endahsari, S., & Hazin, M. (2018). Sumber Daya Dalam Mengimplementasi Program Adiwiyata di SMK Negeri 1 Ngasem. *Jurnal*

- Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 49-55.
<https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p49-55>
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>
- Widayanti, R., Hapsari, I. N., Sandfreni, Firmansyah, G., Kartini, & Nurbayin, M. A. (2022). Kolaborasi dalam Metode Problem Base Learning Dengan Aplikasi Trello Studi Kasus_ Matakuliah E-Business Program Kampus Merdeka. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8-15. <https://doi.org/10.34306/adimas.v3i1.758>
- Yoshua Pangalila. Johanis Kaawoan. Neni Kumayas. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-9.